

## **ABSTRAK**

### **REKRUTMEN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)**

**Oleh**

**RIANDHITA LUTFIANA SAPUTRO**

Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan pada saat penyelenggaraan pemilu. Pada pemilu tahun 2024 terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Panwascam Kedaton yang menerima sejumlah uang dari salah satu calon legislatif yang berasal dari PDI Perjuangan. Pelanggaran tersebut dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tekanan politik, adanya kesempatan, lemahnya integritas, serta pola rekrutmen yang belum sesuai. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola rekrutmen panwascam pada pemilu 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan teori pola rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Nazaruddin Syamsudin dalam Tangkilisan (2003:189). Metode penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara teknis pelaksanaan, rekrutmen panwascam yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan secara terbuka. Berdasarkan kompetensi, Bawaslu Kota Bandar Lampung menggunakan 2 (dua) metode yaitu, CAT dan wawancara untuk menyeleksi kemampuan serta kompetensi kepemiluan peserta panwascam. Kedua metode seleksi tersebut dinilai mampu mengukur kemampuan teknis calon panwascam secara objektif. Berdasarkan syarat yang ditentukan dan peraturan yang berlaku, Bawaslu Kota Bandar Lampung berpedoman pada Keputusan Bawaslu Nomor 314/HK.01/K1/09/2022. Namun, beberapa anggota panwascam dominan terafiliasi oleh organisasi politik dan mahasiswa menimbulkan kecurigaan adanya dugaan praktik kekerabatan dalam proses seleksi panwascam. Asumsi tersebut diperkuat oleh dominasi kesamaan latar belakang organisasi yang dimiliki oleh komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung dan anggota panwascam, yaitu didominasi oleh HMI. Kesamaan organisasi antara ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung dan ketua panwascam Kedaton yaitu Muhammadiyah memperkuat pula asumsi adanya praktik kekerabatan berdasarkan organisasi.

**Kata Kunci :** Pola Rekrutmen, Panwascam

## **ABSTRACT**

### ***RECRUITMENT OF DISTRICT SUPERVISORY COMMITTEE MEMBERS FOR THE 2024 GENERAL ELECTION (A Study of the Bandar Lampung City Election Supervisory Agency)***

**By**

**RIANDHITA LUTFIANA SAPUTRO**

*Bawaslu is an institution tasked with overseeing the conduct of elections. During the 2024 elections, a violation of the code of ethics occurred when the Chair of the Kedaton Panwascam accepted a sum of money from a legislative candidate affiliated with the PDI-P. This violation may have occurred due to several factors, such as political pressure, the presence of opportunity, weak integrity, and recruitment patterns that were not yet appropriate. Therefore, the objective of this study is to examine the recruitment patterns of Panwascam members for the 2024 elections conducted by the Bawaslu of Bandar Lampung City. This study employs the theory of political recruitment patterns proposed by Nazaruddin Syamsudin in Tangkilisan (2003:189). The research method is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews and documentation. The results of this study indicate that, in terms of technical implementation, the recruitment of Panwascam members in Bandar Lampung City was conducted openly. Based on competency, the Bandar Lampung City Bawaslu employed two methods—the Computer-Assisted Test (CAT) and interviews—to assess the electoral capabilities and competencies of Panwascam candidates. Both selection methods were deemed capable of objectively measuring the technical abilities of prospective Panwascam members. Based on the specified requirements and applicable regulations, the Bandar Lampung City Bawaslu adheres to Bawaslu Decision Number 314/HK.01/K1/09/2022. However, the fact that several members of the Panwascam are predominantly affiliated with political and student organizations has raised suspicions of nepotism in the Panwascam selection process. This assumption is reinforced by the dominance of shared organizational backgrounds among the commissioners of the Bandar Lampung City Election Supervisory Agency (Bawaslu) and Panwascam members, namely a dominance of HMI. The shared organizational affiliation between the head of the Bandar Lampung City Bawaslu and the head of the Kedaton Panwascam—both of whom are members of Muhammadiyah—further reinforces the assumption of nepotism based on organizational ties.*

**Keywords :** *Recruitment Pattern, Panwascam*